

# TELAAH KRITIS TERHADAP MASYARAKAT MADANI (*CIVIL SOCIETY*)

Suharno

Dosen Sosiologi Politik pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan  
FISE UNY

## **Abstract**

*Discourse about civil society is almost being a main topic at any conversations beside topics of human rights, democracy, reforms and globalization. Civil society is a kind of society which are open, pluralistic, decentralized with a massive participation on politic activities, honest, fair, self-help, harmony, guarantee the freedom of faith, speaking, making or involving in a union, expressing themselves, of the property rights and respect human rights. The realization needs process and time and commitment from all citizen to reform themselves totally and always consistent and wise to react on deniable conflict.*

**Keywords:** *Civil society, Participation, Political activities, Commitment from all citizens*

## **Pendahuluan**

Pembicaraan mengenai *civil society* hampir sepanjang waktu termasuk yang mengemuka di samping soal hak asasi manusia, demokrasi, dan globalisasi. Belakangan setelah reformasi, maka reformasi juga menjadi bagian dari tema yang sering muncul di permukaan. *Civil society* menjadi penting untuk dikaji oleh berbagai ahli baik politik, pemerintahan, hukum, dan lain-lain. *Civil society* sebagai sebuah tatanan yang diidealkan oleh masyarakat demokratis perlu memperoleh pemahaman secara proporsional oleh setiap warga negara. Hal ini karena baik proses dan unsure perwujudannya membutuhkan peran, kemampuan, dan kesanggupan semua unsure tersebut dengan kapasitasnya masing-masing.

Untuk mewujudkan masyarakat madani dibutuhkan motivasi yang tinggi dan partisipasi nyata dari individu sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini dituntut komitmen masing-masing warganya untuk mereformasi diri secara total dan selalu konsisten dan penuh kearifan dalam menyikapi konflik yang tak terelakan. Tuntutan terhadap aspek ini sama pentingnya dengan kebutuhan akan toleransi sebagai instrumen dasar lahirnya sebuah konsensus atau kompromi. Dengan demikian

pemahaman dari segenap komponen tersebut akan membuahkan langkah bersama oleh setiap komponen masyarakat dan bangsa tersebut untuk mewujudkannya.

Pembicaraan mengenai *civil society* akan mendatangkan persoalan-persoalan tersendiri apabila dikaitkan dengan masalah definisi, batasan atau pengertian, sejarah maupun tokoh-tokoh yang memiliki gagasan mengenai *civil society* ini. Oleh karena itu, paper ini akan menengahkan serta menganalisis berbagai hal tersebut.

### Tinjauan Historis Konsep *Civil Society*

Beberapa tokoh besar yang bicara mengenai *civil society* antara lain Hegel, Cicero, John Locke, Rousseau, Hobbes, Karl Marx, Adam Ferguson, dan masih banyak yang lainnya. Berdasar catatan sejarah, Cicero (106-43 S.M.), seorang orator dan pujangga terkenal dari Roma adalah orang yang pertama kali menggunakan istilah ini, yang merupakan terjemahan Latin dari *civilis societas*. Ia menggunakan istilah ini untuk merujuk kepada sebuah masyarakat politik (*political society*) yang memiliki kaidah hukum sebagai dasar pengaturan hidup.

*Civil society* sebagai sebuah konsep yang memiliki akar dari proses sejarah Barat. Istilah ini sendiri bahkan telah cukup berkembang dalam pembicaraan tentang filsafat sosial pada abad ke-18 di Eropa Barat dan masih berlanjut hingga akhir abad ke-19. Walaupun dalam waktu yang agak lama istilah tersebut sempat tenggelam, sampai tahun 1990-an muncul kembali dan sempat menjadi bahan perdebatan lagi di Eropa Barat.

Istilah *civil society* dalam tradisi Eropa sampai abad ke-18, pada prinsipnya merujuk kepada negara (*state*), yaitu suatu kelompok/kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain. Namun pada pertengahan abad ke-18, sejalan dengan proses pembentukan sosial dan perubahan struktur politik di Eropa sebagai akibat era pencerahan (*Enlightenment*) dan modernisasi, negara dan *civil society* merupakan dua entitas yang berbeda. Adam Ferguson dan Tom Paine termasuk diantara sedikit filsuf era pencerahan saat itu yang berada di balik ide pemisahan tersebut. Dalam perkembangan berikutnya menurut Subono (2003: 28) pemisahan tersebut berlanjut menjadi berhadapan-hadapannya *civil society* dengan aspek kemandiriannya versus kekuasaan negara.

Pemikiran Hegel dan Marx mengenai *civil society* perlu dikaji, karena dari keduanya kemudian Antonio Gramsci mengadopsi dan mengembangkan gagasan pemikirannya sendiri mengenai *civil society*. Hegel (filsuf Jerman) bisa dianggap yang memulai melakukan pembedaan antara negara dan *civil society*. Menurutnya,

*civil society* adalah suatu wilayah kehidupan orang-orang yang telah meninggalkan kesatuan keluarga dan masuk ke dalam kehidupan ekonomi yang kompetitif. Ia adalah *buergerliche Gesellschaft* atau masyarakat borjuis yang berada di antara keluarga dan negara yang tersusun dari unsur-unsur keluarga, korporasi/asosiasi, dan aparat administrasi/legal. Ia adalah salah satu bagian saja dari tatanan politik (*political order*) secara keseluruhan, sedangkan ada di sisi yang lain suatu tatanan politik juga yang disebut negara (*state*) atau masyarakat politik (*political society*).

Hegel dikenal sebagai pemikir yang mengagungkan peran dan posisi negara, melihat *civil society* sebagai *pra-political society* atau *pra-political terrain*, sehingga seluruh kegiatan politik hanya mungkin berjalan di dalam *domain* negara. *Civil society*, masih menurutnya, adalah kekuasaan yang penuh kerisauan, kesengsaraan, dan korupsi baik secara etis maupun fisik. (Gramsci dalam Martin Carnoy, 1984:65-77). *Civil society* adalah arena di mana kebutuhan-kebutuhan tertentu dan kepentingan-kepentingan individu saling berbeda, dan bahkan berbenturan. Dengan kata lain, *civil society* pada dasarnya adalah sebuah medan laga yang tidak pernah sepi dari perbedaan kepentingan. Ini menimbulkan perpecahan-perpecahan sehingga memiliki potensi besar untuk menghancurkan dirinya sendiri (*a self-cripping entity*). Karenanya, menurut Hegel, *civil society* harus diatur dan didominasi oleh kapasitas intelektual superior dari negara, yang merupakan bentuk tertib moral dan etika manusia yang paling tinggi (Gramsci dalam Martin Carnoy, 1984:67).

Istilah *civil society*, sebagaimana dinyatakan oleh Hegel, sebagai *buergerliche Gesellschaft* atau masyarakat borjuis oleh Marx dan Engles, masih tetap dipertahankan. Tetapi dalam perkembangannya memiliki pemahaman yang sangat berbeda, bahkan berlawanan sama sekali. Mereka melihat negara sebagai tertib politik justru merupakan elemen subordinat (suprastruktur), dan sebaliknya, *civil society* yang direduksi sebagai wilayah hubungan-hubungan ekonomi atau hubungan produksi kapitalis adalah elemen yang desesif (struktur atau basis). Menurut Gramsci, *civil society* adalah kelas borjuis itu sendiri. Kondisi yang terjadi adalah *civil society* mendominasi negara atau struktur (basis) menentukan suprastruktur. Tegasnya bahwa *civil society* yang mendefinisikan negara dan mengelola organisasi dan tujuan-tujuan negara yang dikaitkan dengan hubungan produksi material dalam tahap tertentu dari perkembangan kapitalisme. (Gramsci dalam Martin Carnoy, 1984:67 dan Bottomore, et.al, 1983:72-74).

### **Pengertian *Civil Society***

Menurut Havel *civil society* seperti yang dikutip Hikam (1994: 6) ialah rakyat sebagai warga negara yang mampu belajar tentang aturan-aturan main melalui

dialog demokratis dan penciptaan bersama batang tubuh politik partisipatoris yang murni. Sedangkan Mun'im (1994: 6) dengan mengutip pendapat Seligman mendefinisikan istilah *civil society* sebagai seperangkat gagasan etis yang mengejawantah dalam berbagai tatanan sosial, dan yang paling penting dari gagasan ini adalah usahanya untuk menyelaraskan berbagai konflik kepentingan antar individu, masyarakat, dan negara. Gerakan penguatan *civil society* merupakan gerakan untuk merekonstruksi ikatan solidaritas dalam masyarakat yang telah hancur akibat kekuasaan yang monolitik. Secara normatif-politis, inti strategi ini adalah usaha untuk memulihkan kembali pemahaman asasi bahwa rakyat sebagai warga negara memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban kepada para penguasa atas segala yang mereka lakukan atas nama pemerintah.

*Civil society* dalam terjemahan Bahasa Indonesia disebut masyarakat madani. Hal ini diperkuat dengan pendapat beberapa ahli. Rahardjo (1997: 17-24) menyatakan bahwa masyarakat madani merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, *civil society*. Istilah *civil society* sudah ada sejak Sebelum Masehi. Orang yang pertama kali mencetuskan istilah *civil society* ialah Cicero (106-43 SM), sebagai orator Yunani Kuno. *Civil society* menurut Cicero ialah suatu komunitas politik yang beradab seperti yang dicontohkan oleh masyarakat kota yang memiliki kode hukum sendiri. Dengan konsep *civility* (kewargaan) dan *urbanity* (budaya kota), maka kota difahami bukan hanya sekedar konsentrasi penduduk, melainkan juga sebagai pusat peradaban dan kebudayaan.

Mahasin (1995: ix) dengan mengutip pendapat Gellner juga menyatakan bahwa masyarakat madani sebagai terjemahan bahasa Inggris, *civil society*. Kata *civil society* sebenarnya berasal dari bahasa Latin yaitu *civitas dei* yang artinya kota Illahi dan *society* yang berarti masyarakat. Dari kata *civil* akhirnya membentuk kata *civilization* yang berarti peradaban. Oleh sebab itu, kata *civil society* dapat diartikan sebagai komunitas masyarakat kota yakni masyarakat yang telah berperadaban maju. Konsepsi seperti ini menurut Madjid seperti yang dikutip Mahasin (1995: x) pada awalnya lebih merujuk pada dunia Islam yang ditunjukkan oleh masyarakat kota Arab. Sebaliknya, lawan dari kata atau istilah masyarakat non madani adalah kaum pengembara, *badawab*, yang masih membawa citranya yang kasar, berwawasan pengetahuan yang sempit, masyarakat puritan, tradisional penuh mitos dan takhayul, banyak memainkan kekuasaan dan kekuatan, sering dan suka menindas, dan sifat-sifat negatif lainnya.

Sementara menurut Munawir, istilah madani (1997: 1320) sebenarnya berasal dari bahasa Arab, *madaniy*. Kata *madaniy* berakar dari kata kerja *madana* yang berarti mendiami, tinggal, atau membangun. Kemudian berubah istilah menjadi *madaniy*

yang artinya beradab, orang kota, orang sipil, dan yang bersifat sipil atau perdata. Istilah *madaniy* dengan demikian dalam bahasa Arabnya mempunyai banyak arti. Menurut Madjid (1997: 294) konsep madani kerap kali dipandang telah berjasa dalam menghadapi rancangan kekuasaan otoriter dan menentang pemerintahan yang sewenang-wenang di Amerika Latin, Eropa Selatan, dan Eropa Timur.

Sedangkan Nurhadi (1999: 9) yang mengutip Rahardjo menyebutkan bahwa Masyarakat madani ialah masyarakat yang beradab. Istilah masyarakat madani selain mengacu pada konsep *civil society* juga berdasarkan pada konsep negara-kota Madinah yang dibangun Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 M. Masyarakat madani juga mengacu pada konsep *tamadhun* (masyarakat yang berperadaban) yang diperkenalkan oleh Ibn Khaldun dan konsep *Al Madinah al fadhilah* (Madinah sebagai Negara Utama) yang diungkapkan oleh filsuf Al Farabi pada abad pertengahan.

Keidentikan masyarakat madani dengan civil society juga dibenarkan oleh Hall (1998: 1) yang menyatakan bahwa masyarakat madani identik dengan *civil society*, yang artinya suatu gagasan, angan-angan, bayangan, cita-cita suatu komunitas yang dapat terejawantahkan ke dalam kehidupan sosial. Dalam masyarakat madani, pelaku sosial akan berpegang teguh pada peradaban dan kemanusiaan. Sedangkan Hefner (1998: 16-20) berkaitan dengan masyarakat madani ini menyatakan bahwa, masyarakat madani merupakan masyarakat modern yang bercirikan kebebasan dan demokratisasi dalam berinteraksi di masyarakat yang semakin plural dan heterogen. Dalam keadaan seperti ini, masyarakat diharapkan mampu mengorganisasikan dirinya dan tumbuh kesadaran diri dalam mewujudkan peradaban. Mereka akhirnya mampu mengatasi dan berpartisipasi dalam kondisi global, kompleks, penuh persaingan dan perbedaan.

Terwujudnya masyarakat madani menurut Gellner (1995:2) manakala terjadi tatanan masyarakat yang harmonis, yang bebas dari eksploitasi dan penindasan. Singkatnya, masyarakat madani ialah kondisi suatu komunitas yang jauh dari monopoli kebenaran dan kekuasaan. Kebenaran dan kekuasaan adalah milik bersama. Setiap anggota masyarakat madani tidak bisa ditekan, ditakut-takuti, dicekal, diganggu kebebasannya, semakin dijauhkan dari demokrasi, dan sejenisnya. Oleh karena itu, perjuangan menuju masyarakat madani pada hakikatnya merupakan proses panjang dan produk sejarah yang abadi dan perjuangan melawan kezaliman dan dominasi para penguasa menjadi ciri utama masyarakat madani

Perjuangan mewujudkan masyarakat madani di Indonesia berlangsung sesuai dinamika perkembangan bangsa dan terus menerus. Pada awal pergerakan kebangsaan dipelopori oleh Syarikat Islam (1912) dan dilanjutkan oleh Soetan

Syahrir pada awal kemerdekaan (Nordholt, 1999: 15-16). Jiwa demokrasi Soetan Syahrir ternyata harus menghadapi kekuatan represif baik dari rezim Orde Lama di bawah pimpinan Soekarno, maupun rezim Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto, tuntutan perjuangan transformasi menuju masyarakat madani pada era reformasi ini tampaknya sudah tak terbendungkan lagi dengan tokoh utamanya adalah Amien Rais dari Yogyakarta.

Dengan istilah yang berbeda-beda, tidak selalu dengan menyebut masyarakat madani, gelombang tuntutan membentuk masyarakat madani menjadi semakin besar. Masyarakat madani yang mereka harapkan adalah masyarakat yang lebih terbuka, pluralistik, dan desentralistik dengan partisipasi politik yang lebih besar (Nordholt, 1999: 16), jujur, adil, mandiri, harmonis, memihak yang lemah, menjamin kebebasan beragama, berbicara, berserikat dan berekspresi, menjamin hak kepemilikan dan menghormati hak-hak asasi manusia (Farkan, 1999: 4).

### **Masyarakat Madani dalam Perdebatan dua paradigma Demokrasi Sosial Klasik dan Neoliberalisme**

Ada dua paradigma besar yang menjadi dasar perdebatan mengenai masyarakat madani, yaitu Demokrasi Sosial Klasik dan Neoliberalisme (lihat Giddens, 2000: 8-17).

#### **1. Demokrasi Sosial Klasik atau Demokrasi Sosial Gaya Lama.**

Demokrasi sosial klasik atau demokrasi sosial gaya lama memandang pasar bebas sebagai sesuatu yang menghasilkan banyak dampak negatif. Faham ini percaya bahwa semua ini dapat diatasi lewat intervensi negara terhadap pasar. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan segala yang tidak bisa diberikan oleh pasar. Intervensi pemerintah dalam perekonomian dan sektor-sektor kemasyarakatan adalah mutlak diperlukan. Kekuatan publik dalam masyarakat demokratis adalah representasi dari kehendak kolektif. Giddens (2000:8) memberikan ciri-ciri Demokrasi Sosial Klasik sebagai berikut:

- Keterlibatan negara yang cukup luas dalam kehidupan ekonomi dan sosial.
- Negara mendominasi masyarakat madani
- Kolektivisme.
- Manajemen permintaan Keynesian dan korporatisme.
- Peran pasar yang dibatasi: ekonomi sosial atau campuran.
- Pemberdayaan sumber daya manusia secara maksimal.
- Egalitarianisme yang kuat.

- Negara kesejahteraan (welfare state) yang komprehensif: melindungi warga negara “sejak lahir sampai mati”.
- Modernisasi linear.
- Kesadaran ekologis yang rendah.
- Internasionalisme.
- Termasuk dalam dunia dwikutub (bipolar).

## 2. Neoliberalisme dikenal juga dengan *Thatcherisme*

Neo liberalism juga dikenal dengan *Thatcherisme* karena Margaret Thatcher mantan Perdana Menteri Inggris ketika berkuasa sangat setia mengikuti faham neoliberalisme.

Apabila Demokrasi Sosial Klasik cenderung pro pemerintah, maka ciri utama Neoliberalisme adalah memusuhi pemerintah. Jika perluasan perannya terlalu jauh dapat mematikan kebebasan dan kemandirian. Pemerintahan Reagan dan Thatcher mendasarkan diri pada gagasan ini dan menganut skeptisisme liberal klasik mengenai peran negara. Intinya peran negara tidak dibenarkan secara ekonomis dan harus digantikan oleh superior pasar. Giddens (2000:9) memberikan ciri-ciri Neoliberalisme sebagai berikut:

- Pemerintah minimal.
- Masyarakat madani yang otonom
- Fundamentalisme pasar.
- Otoritarianisme moral dan individualisme ekonomi yang kuat.
- Kemudahan pasar tenaga kerja.
- Penerimaan ketidaksamaan.
- Nasionalisme tradisional.
- Negara kesejahteraan sebagai jaring pengaman
- Modernisasi linear.
- Kesadaran ekologis yang rendah.
- Teori realis tentang tatanan internasional.
- Termasuk dalam dunia dwikutub.

## Ciri Masyarakat Madani (*Civil Society*)

Masyarakat madani juga sering dikatakan konsep yang berwajah wajah atau berwajah ganda: memiliki banyak arti atau sering diartikan dengan makna yang beda-beda. Ketika rujukannya dari Bahasa Inggris, maka ia berasal dari kata *civil society* atau masyarakat sipil, sebuah konsep yang sering dikontraposisikan dengan masyarakat militer. Sedangkan menurut Blakeley dan Suggate (1997), masyarakat

madani sering digunakan untuk menjelaskan “*the sphere of voluntary activity which takes place outside of government and the market.*”

Untuk mengetahui karakteristik masyarakat madani, Bahmueller (1997), memberikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif kedalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial.
2. Menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif.
3. Dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara dengan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat.
4. Terjembatannya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunter mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah.
5. Tumbuh kembangnya kreatifitas yang pada mulanya terhambat oleh rejim-rejim totaliter.
6. Meluasnya kesetiaan (*loyalty*) dan kepercayaan (*trust*) sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri.
7. Adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif.

Dari pembahasan dan beberapa ciri tersebut, kiranya dapat dinyatakan bahwa masyarakat madani adalah sebuah masyarakat demokratis yang para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya; pemerintahannya memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kreativitas warga negara untuk mewujudkan program-program pembangunan di wilayahnya. Namun demikian juga perlu dipahami bahwa, masyarakat madani bukanlah masyarakat yang sekali jadi, yang hampa udara, *taken for granted*. Masyarakat madani adalah konsep yang lentur, cair dibentuk dari poses sejarah yang panjang dan perjuangan yang terus menerus. Ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk menjadi masyarakat madani, yakni adanya *democratic governance* (pemerintahan demokratis yang dipilih dan berkuasa secara demokratis) dan *democratic civilian* (masyarakat sipil yang sanggup menjunjung nilai-nilai *civil security*; *civil responsibility* dan *civil resilience*).

Dua kriteria tersebut, menurut Suharto (2002) apabila diurai maka dapat menjadi tujuh prasyarat. Ke tujuh prasyarat masyarakat madani tersebut adalah sebagai berikut:



1. Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat.
2. Berkembangnya modal manusia (*human capital*) dan modal sosial (*social capital*) yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinnya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok.
3. Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan; dengan kata lain terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial.
4. Adanya hak, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum dimana isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan.
5. Adanya kohesifitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan.
6. Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial.
7. Adanya jaminan, kepastian dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antar mereka secara teratur, terbuka dan terpercaya.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka masyarakat madani hanya baru sekedar berhenti pada jargon saja. Bahkan masyarakat madani dapat terjerumus pada masyarakat "sipilisme" yang sempit yang tidak ubahnya dengan faham militerisme yang anti demokrasi dan sering melanggar hak azasi manusia. Dengan kata lain, ada beberapa rambu-rambu yang perlu diwaspadai dalam proses mewujudkan masyarakat madani (DuBois dan Milley, 1992). Sehingga menurut Suharto (2002), rambu-rambu tersebut dapat menjadi jebakan yang menggiring masyarakat menjadi sebuah entitas yang bertolak belakang dengan semangat negara-bangsa :

1. Sentralisme versus lokalisme. Masyarakat pada mulanya ingin mengganti prototipe pemerintahan yang sentralisme dengan desentralisme. Namun yang terjadi kemudian malah terjebak ke dalam faham lokalisme yang mengagungkan mitos-mitos kedaerahan tanpa memperhatikan prinsip nasionalisme, meritokrasi dan keadilan sosial.
2. Pluralisme versus rasisme. Pluralisme menunjuk pada saling penghormatan antara berbagai kelompok dalam masyarakat dan penghormatan kaum mayoritas terhadap minoritas dan sebaliknya, yang memungkinkan mereka mengekspresikan kebudayaan mereka tanpa prasangka dan permusuhan. Ketimbang berupaya untuk mengeliminasi karakter etnis, pluralisme budaya berjuang untuk memelihara integritas budaya. Pluralisme menghindari penyeragaman. Karena, seperti kata Kleden (2000:5), "...penyeragaman adalah

kekerasan terhadap perbedaan, pemerkosaan terhadap bakat dan terhadap potensi manusia.”

3. Sebaliknya, rasisme merupakan sebuah ideologi yang membenarkan dominasi satu kelompok ras tertentu terhadap kelompok lainnya. Rasisme sering diberi legitimasi oleh suatu klaim bahwa suatu ras minoritas secara genetik dan budaya lebih inferior dari ras yang dominan. Diskriminasi ras memiliki tiga tingkatan: individual, organisasional, dan struktural. Pada tingkat individu, diskriminasi ras berwujud sikap dan perilaku prasangka. Pada tingkat organisasi, diskriminasi ras terlihat manakala kebijakan, aturan dan perundang-undangan hanya menguntungkan kelompok tertentu saja. Secara struktural, diskriminasi ras dapat dilacak manakala satu lembaga sosial memberikan pembatasan-pembatasan dan larangan-larangan terhadap lembaga lainnya.
4. Elitisme dan communalisme. Elitisme merujuk pada pemujaan yang berlebihan terhadap strata atau kelas sosial berdasarkan kekayaan, kekuasaan dan prestise. Seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kelas sosial tinggi kemudian dianggap berhak menentukan potensi-potensi orang lain dalam menjangkau sumber-sumber atau mencapai kesempatan-kesempatan yang ada dalam masyarakat. (Suharto,2002)

Sementara itu komunalisme adalah perasaan superioritas yang berlebihan terhadap kelompoknya sendiri dan memandang kelompok lain sebagai lawan yang harus diwaspadai dan kalau perlu dibinasakan.

## Penutup

Manfaat yang dapat diperoleh dengan terwujudnya masyarakat madani ialah terciptanya masyarakat yang demokratis sebagai salah satu tuntutan reformasi khususnya di Indonesia. Di samping itu, melalui masyarakat madani akan mendorong munculnya inovasi-inovasi baru di bidang pendidikan, persoalan-persoalan besar bangsa Indonesia seperti: konflik-konflik suku, agama, ras, etnik, golongan, kesenjangan sosial, kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan pembagian “kue bangsa” antara pusat dan daerah, saling curiga serta ketidakharmonisan pergaulan antarwarga dan lain-lain yang selama Orde Baru lebih banyak ditutup-tutupi, direkayasa dan dicarikan kambing hitamnya; diharapkan dapat diselesaikan secara arif, terbuka, tuntas, dan melegakan semua pihak, suatu prakondisi untuk dapat mewujudkan kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, kekhawatiran akan terjadinya disintegrasi bangsa dapat dicegah.

Untuk mewujudkan masyarakat madani dibutuhkan motivasi yang tinggi dan partisipasi nyata dari individu sebagai anggota masyarakat. Hal ini mendukung

pendapat Suryadi (1999: 23) dan Daliman (1999: 78) yang intinya menyatakan bahwa untuk mewujudkan masyarakat madani diperlukan proses dan waktu serta dituntut komitmen masing-masing warganya untuk mereformasi diri secara total dan selalu konsisten dan penuh kearifan dalam menyikapi konflik yang tak terelakan. Tuntutan terhadap aspek ini sama pentingnya dengan kebutuhan akan toleransi sebagai instrumen dasar lahirnya sebuah konsensus atau kompromi.[\*]

## Daftar Pustaka

- Bahmueller, CF, 1997, *The Role of Civil Society in the Promotion and Maintenance of Constitutional Liberal Democracy*, <http://civnet.org/civitas/panam/papers/bahm.htm>.
- Budiman, Arief, 1996, *Teori Pembangunan Dunia ketiga*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Budiman, Arief, *State and Civil Society*, The Publications Officer, Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, Clayton, Victoria.
- Chambers, Robert, 1995, "Poverty and Livelihoods: Whose Reality Count ?". dalam Uner Kirdar dan Leonard Silk (ed). *People From Impoverishment to Empowerment*. New York, New York University Press.
- Carnoy, Martin. *The State and Political Theory*. Princeton University Press, 1984.
- Cohen, Jean L. dan Andrew Arato. *Civil Society and Political Theory*. Massachusetts Institute of Technology, 1992.
- Daliman, A. 1999. *Reorientasi Pendidikan Sejarah melalui Pendekatan Budaya Menuju Transformasi Masyarakat Madani dan Integrasi Bangsa*, Cakrawala Pendidikan. Edisi Khusus Mei Th. XVIII No. 2.
- Farkan, H. 1999. *Piagam Medinah dan Idealisme Masyarakat Madani*. Bernas, 29 Maret.
- Ganie-Rochman, Meuthia, 2000, artikel "Good Governance: Prinsip, Komponen dan Penerapannya", dalam *HAM : Penyelenggaraan Negara Yang Baik dan Masyarakat Warga*, Jakarta : KOMNAS HAM.
- Gellner, E. 1995. *Membangun Masyarakat Sipil: Prasyarat Menuju Kebebasan* (Terjemahan Hasan, I) Bandung: Mizan.

- Giddens, Anthony 2000, *Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Goulet, Denist, 1998, *Participation in Development: New Avenues*, World Development, vol 17 nomor 2 (Februari 1998:130).
- Hall, J.A, 1998. Genealogies of Civility. Dalam Hefner (Editor). *Democratic Civility: The History and Cross Cultural Possibility of a Modern Political Ideal*. New York: Longman.
- Hefner, R.W. 1998. *Civil Society: Cultural Possibility of a Modern Ideal*. Society, Vol.35, No, 3 March/April.
- Hikam, M.A.S., 1994. *Demokrasi adakan Wacana Civil Society*. Republika. 10 Oktober.
- Korten, David, 1993, *Community Organization and Rurel Development, a Learning Process, Approach*. A Ford Pondation Reprint From Public Administration Review.
- Madjid, N. 1977. *Dinamika Budaya Pesisir dan Pedalaman: Menumbuhkan Masyarakat Madani, dalam HMI dan KAHMI Menyongsong Perubahan Menghadapi Pergantian Zaman*. Jakarta: Majelis Nasional KAHMI
- Mahasin, A. 1995. "Masyarakat Madani dan Lawan-lawannya: Sebuah Mukadimah" dalam Gneller. *Membangun Masyarakat Sipil: Prasyarat menuju Kebebasan*. Diterjemahkan: Hasan, I. Bandung: Mizan
- Mun'im, A.D.Z. 1994. *Masyarakat Sipil sebagai Masyarakat Beradab*, Republika 20 September.
- Nordholt, N.S. 1999. *Civil Society di Era Kegelisahan*. Basis. Np. 3-4. Maret.
- Rahardjo, D. 1997. *Relevansi Iptek Profetik dalam Pembangunan Masyarakat Madani*, *Academika*, Vol. 01, Th. XV, halaman 17-24.
- Siagian, SP, 1991, *Adimnistrasi Pembangunan*. Cetakan kesebelas, Gunung Agung, Jakarta.
- Subono, Nur Imam, ' Civil Society ', Patriarki, dan Hegemoni, *CIVIC Vol.1 No.2 Agustus 2003*
- Suharto, Edi, 2002, Masyarakat Madani: Aktualisasi Profesionalisme Community Workers Dalam Mewujudkan Masyarakat Yang Berkeadilan, Makalah disajikan pada *Orasi Ilmiah dalam Pembentukan HIMA Jurusan Pengembangan Sosial Masyarakat (PSM) STKS Bandung, Senin 21 Oktober 2002*

Suryadi, K. 1999. Demokratisasi Pendidikan Demokrasi, Mimbar Pendidikan. *Jurnal Pendidikan No. 1 Tahun XVIII*.

Suwardi, 1999. Demokratisasi Pendidikan dalam Pengajaran Pragmatik Sastra Sebagai Wahana Penciptaan “Masyarakat Madani” *Cakrawala Pendidikan, Edisi Khusus Mei. Th. XVIII, No. 2*.

Raharjo, Dawam, *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: LP3ES dan LSAF, 1999)

Tjokrowinoto, Moelyarto, 1996, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Jakarta : MIA – UNKRIS.

Usman, Husaini, 2001, *Makalah Menuju Masyarakat Madani Melalui Demokratisasi Pendidikan*, Balitbang-Depdiknas.